



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH DI DESA PULAU
BIRANDANG KECAMATAN KAMPA
KABUPATEN KAMPAR
(TINJAUAN SOSIOLOGIS)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Irsyadul Muhtadi
NIM: 11521101649

UIN SUSKA RIAU
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa Pulau Bidadari Kec. Kampa Kab. Kampar (Tinjauan Sosiologis).” Yang Ditulis Oleh IRSYADUL MUHTADI, NIM : 11521101649 Ini Sudah Diperiksa dan Disetujui Untuk Dimunaqasahkan.

Pekanbaru, 25 Juli 2020
Dosen Pembimbing,

Mutasir, SHI. M. Sy
NIK. 130 217 036

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR (Tinjauan Sosiologis)”** yang ditulis oleh :

Nama : Irsyadul Muhtadi
 NIM : 11521101649
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Setretaris

Agus Fariz Fakhrullah, M.Ag

Penguji I

Dewi Mawatia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini, saya:

Nama : Irsyadul Muhtadi
NIM : 11521101649

Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Birandang, 30 April 1997

Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa
Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar
(Tinjauan Sosiologis)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dari sumbernya.

Pekanbaru, 01 Juli 2020

Saya yang menyatakan,


Irsyadul Muhtadi

NIM. 11521101649

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar (Tinjauan Sosiologis)”** merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisa pemberlakuan sangsi adat pembatalan *Khitbah* pada masyarakat Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari pemberlakuan ganti rugi pembatalan *Khitbah* yang merupakan sebuah adat yang berlaku ditengah masyarakat Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana proses penyelenggaraan *khitbah* didesa Pulau Birandang dan bagaimana penerapan ganti rugi pembatalan *khitbah* pada masyarakat desa Pulau Birandang.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan *khitbah* didesa Pulau Birandang. Kemudian untuk mengetahui tujuan dari ganti rugi pembatalan *khitbah* pada masyarakat Pulau Birandang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang berlokasi di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data yang penulis kumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku pembatalan *khitbah*, tokoh masyarakat, tokoh bagama dan tokoh adat di desa Pulau Birandang, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan pembatalan *Khitbah* di Desa Pulau Birandang dalam tinjauan sosiologis.

Penyusun menyimpulkan, bahwa pelaksanaan Proses penyelenggaraan *khitbah* didesa pulau birandang kec. Kampa kab. Kampar ialah sebagai berikut: *Maantau tando, Maimbau mamak.*

Tujuan ganti rugi pembatalan *khitbah* di Desa Pulau Birandang kec. Kampa Kab. Kampar berdasarkan tinjauan sosiologis yaitu: Masyarakat tidak menyepelekan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama dua belah pihak kemudian untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat serta menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak ditengah masyarakat.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat, menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Ganti Ragi Pembatalan Khitbah di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar (Tinjauan Sosiologis)”**. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam konsentrasi Keluarga dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliah kepada alam yang islamiah bertauhid dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kepada ibuku tercinta, ibunda Rosmaini yang menjadi orang tua terhebat, tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya, dan terimakasih untuk supportnya selama ini.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pembantu Rektor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I,II,III beserta seluruh Civitas Akademik.

Bapak Dr. Hajar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

Bapak H. Akmal Abdul Munir, LC. MA Selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga sekaligus sebagai Penasehat Akademik di UIN SUSKA RIAU.

Bapak Mutasir SHL., M. Sy sebagai dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Dosen program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, yang telah membimbing, memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat menjadi pegangan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Pihak-pihak instansi yang terkait dalam penulisan skripsi ini, Bapak Tomas Renaldo selaku kepala desa Pulau Birandang yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga dan saudara penulis yaitu Rafiqatul Aulia, Nurfadilla, dan Desva Leni yang selalu memberikan dukungan dan doanya selama ini.
9. Untuk teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 yang hampir empat tahun belajar saling mendukung dan telah memberi banyak arti dalam menjalankan kuliah.
10. Teman-teman yang telah mendo'akan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis,

Irsyadul Muhtadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan	11
F. Metode Pengumpulan Data.....	12
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografi Desa Pulau Birandang.....	15
B. Demografi Desa Pulau Birandang.....	17
BAB III TINJAUAN TEORITIK TENTANG KHITBAH	
A. Pengertian Khitbah dan Dasar Hukumnya.....	26
B. Denda Membatalkan Khitbah Perspektif Hukum Islam	39.
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Proses Penyelenggaraan Khitbah di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kabupaten Kampar	48
Penerapan Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa	
Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	59

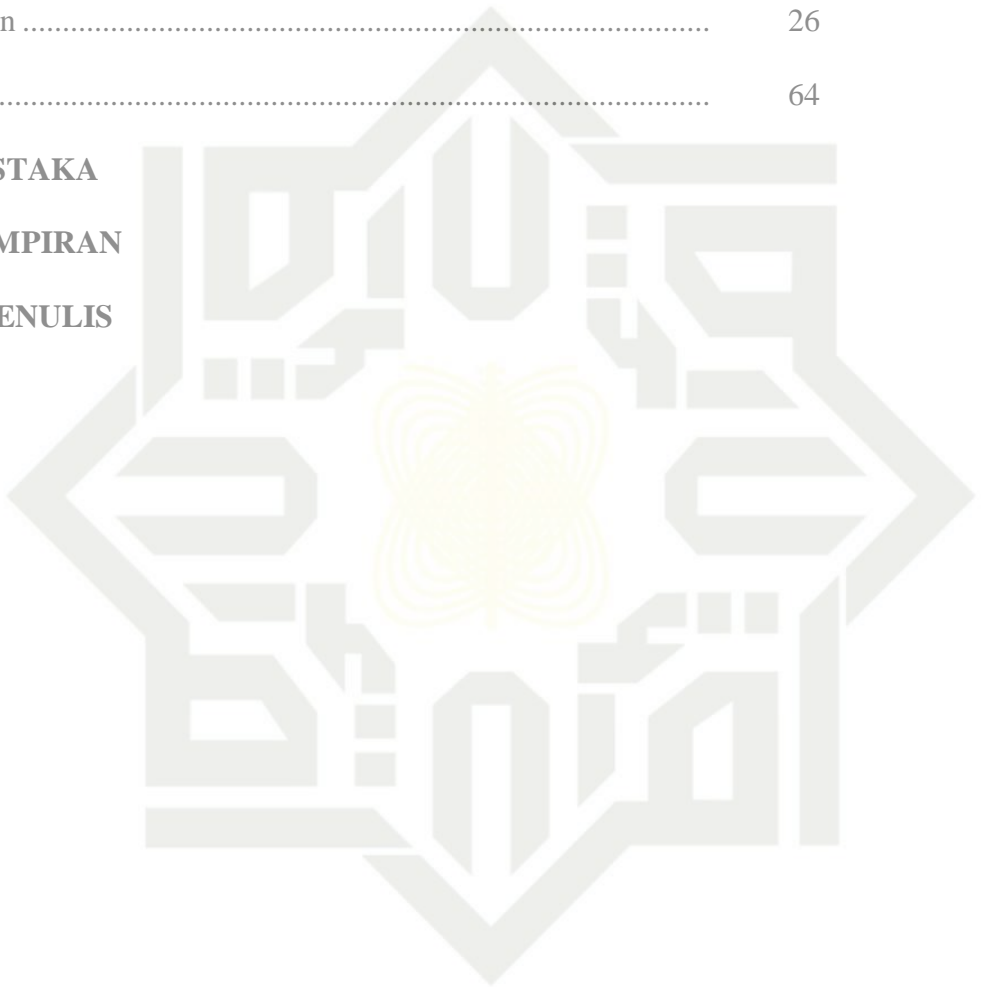
BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	26
B Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel	Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya	16
Tabel	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang	
	Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang	
	Menurut Agama Dan Kepercayaannya	18
Tabel	Jumlah Lembaga Kagamaan Desa Pulau	
	Birandang Tahun 2019/2020	19
Tabel	Jumlah Sarana Pendidikan Didesa Pulau Birandang	20
Tabel	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang	
	Menurut Tingkat Pendidikan	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah dilaksanakannya *khitbah* atau peminangan. Untuk memberikan pengertian tentang *Khitbah* (meminang) dengan mengkasrahkan **Kha'** adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi. Jika permohonannya dikabulkan, maka tidak lebih sebagai janji untuk menikah. Akan tetapi Pernikahan belum terlaksana dengannya dan wanita tersebut masih tetap sebagai wanita asing baginya hingga ia melangsungkan akad pernikahan dengannya.

Adapun dasar Nash Al-Qur'an tentang *khitbah* atau lamaran:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawani mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.¹

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah.²

Dalam hadits nabi Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya : “Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai

¹ Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014)

² Referensi: <https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”³

Adapun istilah *khitbah* (peminangan) yang dijelaskan di dalam KHI pada pasal 1 (a), sebagai berikut “Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”⁴

Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda, karena ulama’ ahli fikih tidak menyinggung bab ini dalam uraian mereka tentang peminangan.

Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kata *Khitbah* ini lebih dikenal dengan *Maantau Tando*.⁵ *Maantau Tando* artinya mengantar tanda keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bukti bahwa ia ingin menikahinya. Hal ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan dan menjadi kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁶

Dalam pelaksanaan *Khitbah* biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.⁷

Praktik *Khitbah* dalam Implikasi Hukum ketika meminang boleh dilakukan oleh perantara atau secara langsung namun didampingi oleh mahramnya. Ketika tujuan pernikahan adalah untuk mencari ketenangan jiwa,

³ *ibid*

⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Depag RI., 2003), h. 9

⁵ Wawancara dengan bapak Arisman, pemuka adat didesa Pulau Birandang pada tanggal 15 juni 2020

⁶ Wawancara dengan bapak Khaidarus, imam masjid Nurul Huda Pulau Birandang pada tanggal 14 juni 2020 di Masjid Nurul Huda Desa Pulau Birandang.

⁷ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqih Munakahat* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah maka dianjurkan bagi laki-laki untuk melihat calon istrinya dan memperhatikan dengan tujuan meminangnya.

Adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Birandang, ketika sebelum terjadinya Pernikahan, pihak laki-laki harus melakukan *khitbah* terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk mengarah kepada hubungan yang lebih serius, yang dinamakan dengan *Antau Tando* atau antar tanda keseriusan kedua belah pihak. Wakil kedua belah pihak biasanya adalah ibu, ayah, atau seseorang yang sangat dipercaya.

Pada proses ini perwakilan dari pihak perempuan tidak langsung menyetujui, namun akan bertanya kepada anak dari pihak perempuan. Dari sini bisa dibicarakan persetujuan untuk menerima lamaran atas persetujuan bersama. Biasanya penentuan hari baik pernikahan ditentukan bersama antara kedua pihak setelah melakukan *khitbah*.

Dalam kajian sosiologi di dalam masyarakat, maupun kelompok-kelompok sosial lainnya, senantiasa dikenal apa yang disebut dengan pengendalian sosial (sosial kontrol). Sistem pengendalian sosial (disebut juga “pengendalian sosial” atau “Kontrol sosial” atau kadang-kadang juga dinamakan “pengawasan sosial”) adalah, suatu proses baik proses yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981). h. 47

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, disiplin ilmu sosiologi juga bersilangan dengan kajian ilmu hukum, yang lazim diistilahkan dengan sosiologi hukum (sociology of law). Kajian ini sering digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau pendekatan interdisipliner dalam studi hukum. Perdebatan timbul ketika melihat sosiologi hukum sebagai milik disiplin ilmu sosiologi. Akan tetapi, ada yang menganggapnya sebagai bidang penelitian yang terjebak antara disiplin hukum dan sosiologi. Ada juga yang menganggapnya bukan sub-disiplin sosiologi atau cabang studi hukum, tetapi sebagai bidang penelitian sendiri dalam tradisi ilmu sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, sosiologi hukum dapat digambarkan sebagai studi hukum empiris yang sistematis, berlandaskan teoretis, sebagai serangkaian praktik sosial atau sebagai aspek atau bidang pengalaman sosial. Dalam hal ini sosiologi hukum memperlakukan hukum dan keadilan sebagai lembaga fundamental dari struktur dasar mediasi masyarakat. Sosiologi memediasi antara kepentingan politik dan ekonomi, antara budaya dan tatanan normatif masyarakat.

Sosiologi juga membangun dan memelihara, saling ketergantungan, dan membentuk diri masyarakat sebagai sumber konsensus, paksaan dan kontrol sosial (social enforcement and control).⁹

Hukum adat perkawinan sangat beragam bentuknya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga penerapan prosesi dan sanksi juga bisa berbeda. Hukum adat perkawinan memiliki kompleksitas tinggi. Pelaksanaannya bukan hanya pada saat prosesi perkawinan terjadi, akan tetapi termasuk pada saat

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Sosiologi Dan Antropologi Hukum*, (Naskah Aceh: Ulee Kareng, Banda Aceh, 2018, h. 10-11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum, saat berlangsung, sesudah perkawinan, bahkan sampai mempunyai keturunan. Hukum adat perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Kegiatan hukum keluarga bisa melingkupi dari sejak seseorang dalam kandungan hingga ke liang lahat. Dalam rentang waktu tersebut ada tahapan-tahapan yang perlu dikerjakan melalui prosesi adat. Adapun upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Birandang salah satunya adalah *Maantau Tando*.

Maantau Tando adalah mengantar tanda keseriusan. Dalam upacara *maantau tando* ini, secara adatnya di Desa Pulau Birandang yang biasanya sering digunakan sebagai hantaran adalah berupa gelang kesat, dua helai kain panjang, dua helai kain handuk, dan dua helai kain sarung. Benda ini merupakan adat yang berlaku ditengah masyarakat Pulau Birandang dalam pelaksanaan lamaran.

Ketika lamaran laki-laki diterima oleh pihak perempuan maka tahap ke jenjang akad pernikahan bisa dilanjutkan dengan menunggu kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak.

Hal-hal yang dibahas dalam proses *Maantau Tando* adalah penetapan hari dilangsungkannya akad nikah. Ketika sudah disepakati hari akad pernikahannya maka kedua calon belum boleh berdua-duaan (berkholwat) karena walaupun sudah dapat restu dari keluarga namun belum ada ikatan yang sah untuk bersama karena sahnya pernikahan setelah ada akad *ijab* dan *Kabul*.

Dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat tentunya tidak semua hal yang kita rencanakan bisa tercapai dengan semestinya. Kadangkala hal yang tidak di inginkan bisa saja terjadi. Seperti dalam perjanjian pernikahan terdapat

pembatalan. Hal yang sering dijadikan alasan dalam membatalkan tunangan oleh masyarakat di desa Pulau Birandang adalah sebagai berikut:

1. Munculnya keragu-raguan dari pihak perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan karena adanya orang yang meminang yang lebih mapan dari orang yang meminang sebelumnya.
2. Adanya penemuan dari salah satu pihak keluarga yang tunangannya berselingkuh dengan orang lain.
3. Dan pembatalan disebabkan oleh kematian.

Ada juga kejadian yang sering dijadikan alasan pembatalan *Khitbah* di tengah-tengah masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar adalah terdapat ketidakcocokan antara dua keluarga yang diketahui setelah proses *Khitbah* itu terjadi. Ada pihak yang merasa dirugikan baik berupa moril ataupun materil bahwa dari mereka belum cukup mapan untuk menghidupi sebuah keluarga.

Ada juga dikarenakan karena lamanya jarak waktu antara mengkhitbah dengan akad nikah sehingga banyak hal yang mungkin akan terjadi diantaranya adalah adanya lamaran dari pihak lain bagi pihak perempuan yang lebih siap dan mapan dari segi ekonomi, dan dari pihak laki-laki pun dimungkinkan karena jatuh hati kepada perempuan lain yang menyebabkan keraguan untuk melanjutkan tunangannya ke jenjang pernikahan

Namun dalam adat masyarakat desa Pulau Birandang apabila pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan maka pihak laki-laki tidak bisa mengambil kembali apa yang telah diberikan ketika meminang.

Sebaliknya apabila pembatalan *khitbah* dilakukan oleh pihak Perempuan tanpa ada kesalahan dari pihak laki-laki maka ia harus mengembalikan dua kali lipat dari hantaran sebagai ganti rugi pembatalan *khitbah*.¹⁰

Membatalkan *Khitbah* tidak menimbulkan pengaruh apapun sebelum terjadi akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh pengkhitbah, boleh ia minta lagi, baik masih utuh, rusak, atau berkurang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut, jika barang tersebut berbentuk harga. Atau dengan mengganti barang tersebut dengan yang serupa jika barang tersebut berupa benda.¹¹

Hukum adat yang berlaku didesa Pulau Birandang, apabila pihak laki-laki yang membatalkan *khitbah*/tunangan maka hantaran dari pihak laki-laki tidak bisa diambil kembali. Namaun apabila pembatalan *khitbah*/tunangan dilakukan oleh pihak perempuan, maka di beri sangsi dua kali lipat.¹²

Peristiwa ini sudah lama terjadi ditengah-tengah masyarakat Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, bahkan sudah menjadi hukum adat yang berlaku. Sehingga jika ada yang membatalkan Pertunangan, kemudian tidak melakukan ganti rugi/membayar sangsi, maka mereka akan dikenakan dampak sosial seperti dicela dan menjadi buah bibir ditengah masyarakat.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Jalinus Ketua BPD Pulau Birandang tanggal 18 juni 2020 didesa Pulau Birandang

¹¹ Az- zuhaili, wahbah *Fiqh Islam* 9, penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 36

¹² Wawancara dengan bapak Muhammad Shaleh, (tokoh masyarakat) pada tanggal 30 Juni 2020 didesa Pulau Birandang

Fenomena sosial ini akan memberikan dampak kepada keluarga maupun kepada individu secara langsung dan dapat menimbulkan konflik-konflik di tengah masyarakat.

Namun disisi lain juga mempunyai tujuan baik dalam segi norma dan nilai-nilai sosiologis yang akan dicapai dan dipertahankan ditengah masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya konflik setelah pembatalan. Karena pernikahan bukan saja mengikat dua orang insan, akan tetapi juga mengikat keluarga kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan).

Demikian pula masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang ingin mempertahankan hidup rukun, adil, damai dan sejahtera dengan saling menghormati antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang **“Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa**

Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Tinjauan Sosiologis)”

B. Batasan Masalah

Pada dasarnya pembatalan khitbah merupakan hal yang di perbolehkan dalam aturan Agama, akan tetapi masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar memiliki pandangan bahwa *Khitbah* adalah suatu perjanjian yang wajib ditepati. Oleh sebab itu pada masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdapat sanksi bagi pelaku pembatalan *Khitbah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui ganti rugi pembatalan *khitbah* yang berkembang ditengah masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelenggaraan khitbah di desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana Penerapan ganti rugi pembatalan khitbah pada masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Khitbah di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- b. Penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang penerapan ganti rugi pembatalan khitbah di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya dan menambah pengetahuan tentang hukum-hukum yang tersirat di dalamnya.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam agar membawa manfaat bagi semua orang yang membacanya.
- c. Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum khususnya dalam bidang hukum Islam.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan

1 Penelitian ini adalah penelitian empiris (penelitian yang berfokus meneliti fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta menembangkan konsep yang ada)¹³ yang bersifat deskriptif, dimana penulis bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan masyarakat Desa Pulau Birandang, dalam masalah ganti rugi pembatalan *khitbah*, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan adat yang nampak dan berpengaruh dalam situasi yang diselidiki. Penelitian yang penulis gunakan yaitu, metode penelitian hukum sosiologis yang dinyatakan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.¹⁴ Seperti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembebanan ganti rugi pembatalan *khitbah* di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2 Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.¹⁵ Terdiri dari sumber data yang primer dan sumber data sekunder. Data dalam penelitian ini Terdiri dari:

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 16

¹⁴ Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h.

¹⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998), hlm. 114.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Informan

Informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai situasi kondisi obyektif wilayah daerah yang diteliti yang terdiri dari aparatur pemerintah bpk (Tomas Renaldo) Kepala Desa Pulau Birandang, kemudian bpk (Jalinus) sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dePulau Birandang juga sebagai Tokoh agama (bpk. Khaidarus) sesepuh desa Pulau Birandang. Bapak M. Zen sebagai sesepuh dan juga sebagai toko adat masyarakat suku melayu di Pulau Birandang. Bpk. Azir sebagai pemuka adat di Pulau Birandang. Dan bapak Saparuddin sebagai pemuka adat. Bpk. Jasmani sebagai Tokoh Masyarakat, bpk. Minan sebagai tokoh masyarakat, bpk. Arisman sebagai pemuka adat.

Berdasarkan dari wawancara diatas, maka penulis menjadikan sebagai data primer.

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama yang membahas tentang khitbah dan buku buku yang terkait dengan adat (masyarakat Kampar). Selain itu juga buku sosiologi hukum keluarga, serta banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara, Yakni dilakukan penulis kepada sejumlah informan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode interview terpimpin dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pedoman wawancara (interview guide) sebagai acuan agar proses interview terfokus pada permasalahan ini.

Studi kepustakaan, yaitu dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku tentang perkawinan khususnya yang membahas khitbah, adat istiadat, dan tinjauan sosiologis.

2. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam pengolahan data penulis menguraikan pendapat responden tentang ganti rugi pembatalan khithbah dalam bentuk kata-kata atau jawaban berdasarkan pertanyaan yang penulis ajukan, kemudian penulis juga menganalisis apa yang menjadi factor serta tujuan yang melatar belakangi masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Data data yang telah terkumpul diperiksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau yang biasa disebut editing.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab terdiri dari sub-sub pokok sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan. yang mencakup dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada bab kedua ini penulis akan menggambarkan secara umum lokasi penelitian.
- BAB III Bab ketiga ini penulis akan menjelaskan seputar *khithbah* bila dilihat dari sosial masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten kampar

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat Desa Pulau Birandang tentang ganti rugi pembatalan khitbah, tinjauan sosiologis pembatalan khitbah serta analisis dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB IV Kesimpulan dan Saran





BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Geografi Desa Pulau Birandang

1. Sejarah singkat Desa Pulau Birandang

Masyarakat desa Pulau Birandang adalah mayoritas *Ughang Ocu*, yang tidak mau disebut orang Minang dan tidak mau pula disebut orang Melayu. Karena pada sejarahnya peradaban di Kampar termasuk salah satu peradaban tertua, dengan adanya peninggalan Candi Muara Takus.¹⁶

2. Letak Wilayah Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, memang dilihat dari segi nama, nama Kecamatan Kampa merupakan nama baru yang dulu bernama Kecamatan Kampar Timur.

Kecamatan Kampa terdiri dari beberapa wilayah diantaranya Desa Pulau Rambai, Desa Pulau Birandang, Desa Kampar, Desa Koto Perambahan, dan dua buah Desa hasil pemekaran pada awal tahun 2006 yaitu Desa Deli Makmur dan Desa Sungai Putih.

Jarak Desa Pulau Birandang dengan ibu kota Kecamatan Kampa lebih kurang 2 KM, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 23 KM. Desa Pulau Birandang merupakan dataran rendah. Berdasarkan letak administratifnya, sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan

¹⁶ Wawancara dengan datuk Podo Jalelo selaku Ninik Mamak didesa Pulau Birandang pada tanggal 17 Juni 2020

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Sungai Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Alam Panjang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuapan.

Luas dan Penggunaan Tanah

Wilayah Desa Pulau Birandang merupakan wilayah yang cukup luas, sehingga untuk memudahkan pengurus desa memperhatikan masyarakat, maka Desa Pulau Birandang dibagi menjadi lima dusun. Desa Pulau Birandang memiliki luas 40.000 hektar, wilayah terbesar dipergunakan untuk perkebunan yaitu seluas 20.000 hektar dan wilayah terkecil untuk pemakaman yaitu seluas 2 hektar.

Tabel Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya

NO	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	2.600	6,5%
2	Sawah	1.200	3
3	Kebun	20.000	50
4	Pemakaman	2	0,01
5	Lainnya	16.198	40,5
Jumlah		40.000	100%

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019

Keadaan Iklim Desa Pulau Birandang

Keadaan iklim didesa Pulau Birandang sama halnya dengan keadaan iklim Provinsi Riau pada umumnya

Mayoritas masyarakat Desa Pulau Birandang bekerja sebagai petani dan berkebun. Untuk menunjang penghasilan pertanian dan perkebunan masyarakat, masyarakat harus memperhatikan keadaan iklim untuk menentukan saat yang tepat menebur benih sehingga pertanian dan perkebunan masyarakat dapat tumbuh dengan baik. Dari hasil wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui Curah hujan berkisar antara 2.500 – 2.650 mm /tahun, Suhu udara rata-rata tahunan berkisar 32 °C, dimana puncak bulan basah pada bulan April dan Oktober, serta bulan kering pada bulan Februari dan Juli.¹⁷

Demografi Desa Pulau Birandang

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut monografi Desa Pulau Birandang tahun 2018 penduduknya berjumlah 4.175 jiwa yang terdiri dari 2.007 jiwa (47,28%) laki-laki dan 2.168 jiwa (52,72%) perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.318.¹⁸

Tabel
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah penduduk
			L	P	
1	1	302	490	563	1.053
2	2	471	721	774	1.495
3	3	219	384	432	816
4	4	177	211	233	444
5	5	149	201	166	367
Jumlah		1.318	2.007	2.168	4.175

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang akan mengakibatkan jumlah pertumbuhan penduduk tinggi karena banyaknya angka kelahiran.

¹⁷ Nasrul, Sekretaris Desa Pulau Birandang, wawancara, Desa Pulau Birandang, 15 Juli 2020.

¹⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan Di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Pulau Birandang mencerminkan budaya Islam.¹⁹

Tabel
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Agama Dan Kepercayaannya

No	Nama Agama	Jumlah Penganutnya	Persentase (%)
1	Islam	4.175	100
2	Kristen	-	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Konghucu	-	-
Jumlah		4.175	100

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang yaitu 4.245 orang (100%) dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudidaya

¹⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan masyarakat. Penduduk Desa Pulau Birandang seluruhnya beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 8 buah masjid dan 10 mushallah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar al-Quran dan wirid pengajian serta kegiatan agama lain.²⁰

Tabel
Jumlah Lembaga Kagamaan Desa Pulau Birandang Tahun 2019/2020

NO	Dusun	Jumlah Mesjid	Jumlah Mushallah
1	1	2	1
2	2	1	-
3	3	2	3
4	4	2	4
5	5	2	2
Jumlah		9 Mesjid	10 Mushallah

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Pulau Birandang adalah sebanyak 9 buah mesjid dan 10 buah mushallah, dan lembaga keagamaan terbanyak terdapat di Dusun 4 dengan 2 buah masjid dan 4 buah mushallah.

i. Pendidikan

Masyarakat didesa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang

²⁰ Nasrul, Sekretaris Desa Pulau Birandang, wawancara, Desa Pulau Birandang, 15 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan disekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah.

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada didesa Pulau Birandang ini baru sampai tingkat Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.²¹

Tabel
Jumlah Sarana Pendidikan Didesa Pulau Birandang

NO	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negri	Swasta	
1	PAUD	-	4	4
2	TK	3	-	3
3	SD	4	-	4
4	MDA	-	4	4
5	SLTP/MTS	-	1	1
6	SMA/MA	1	1	2
Jumlah		8	10	18

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 4 Pendidikan Usia Dini, 3 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 4 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 1

²¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit Sekolah Menengah Atas, dan 1 unit Pondok Pesantren yang sederajat SMA dan SMP.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus sekolah menengah atas melanjutkan ketempat lain.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	PAUD	120	5,56
2	TK	164	7,59
3	SD	625	28,94
4	SLTP	434	20,09
5	SLTA	577	26,71
6	Diploma	115	5,32
7	Sarjana	125	5,79
Jumlah		2.160	100

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 625 jiwa dengan persentase 28, 94%. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat Pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa dengan persentase 5,32%. Fakta dilapangan berdasarkan survei peneliti banyak penduduk yang tidak tamat SD, namun tidak tercatat dalam monografi Desa sehingga jumlahnya secara pasti tidak diketahui.

Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan input data petugas sensus Desa sehingga masyarakat yang tidak tamat SD tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pulau Birandang tergolong rendah. Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan Desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.

2. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga hal nya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai, Pitopang dan lain sebagainya. Meskipun mereka berbeda dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Desa Pulau Birandang adalah berdasarkan garis keturunan Ibu (matrilinier), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara Ibu serta kerabat dari nenek. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku Ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku Ibu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya menurut adat di Desa Pulau Birandang anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus garis keturunan yang berpola materineal. Desa Pulau Birandang terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya, yaitu:²²

1. *Badikui*

Badikui merupakan salah satu nyanyian yang diiringi dengan alat musik tradisional yang disebut *gubano* dan *tepak*, yaitu sebuah alat yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan kemudian digiling sehingga seperti lembaran yang tipis dan diukir dengan kayu. Cara memainkannya yaitu dengan memukul-mukul alat tersebut dengan iringan bacaan zikir dan shalawat. Menurut bapak M. Zen (sesepuh dan personil *dikiu* di Pulau Birandang) awal mula lahirnya *Badikui* ini bersempenaan dengan dibentuknya ninik mamak persukuan dikampar.²³ Kesenian *Badikui* ini pada mulanya digunakan untuk arak-arakan dalam acara mengantarkan mempelai kerumah mempelai perempuan, arak-arakan dalam mengantarkan anak laki-laki untuk mandi kesungai Kampar sebelum melakukan *Khitan* atau Sunat Rasul yang sering disebut oleh masyarakat Pulau Birandang, dll.

2. *Maaghak Sughek*

Maaghak Sughek merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang saat musim sebelum menanam padi.

²² Saparuddin, (Pemuka Adat), wawancara, di Desa Pulau Birandang, tanggal 18 Juli 2020.

²³ Wawancara dengan bpk M. Zen (Tokoh Masyarakat) Didesa Pulau Birandang, tanggal 20 Juli 2020 didesa Pulau Birandang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Acara ini dilakukan dengan masyarakat mengelilingi kampung sampai ke tempat persawahan kemudian masyarakat menaburkan semacam obat ke persawahan tersebut, kemudian kembali lagi ke tempat semula dan semua itu tidak luput juga dengan iringan alat music tradisional yang disebut *badikiu*.

3. Ziarah Kubur

Ziarah Kubur merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat disaat memasuki bulan suci Ramadhan, dalam hal ini masyarakat berbondong-bondong mengajak sanak keluarganya untuk datang ke kuburan keluarganya masing-masing untuk membersihkan pusaran dan membacakan surat *Yaasiin* setelah itu mendoakan para arwah yang telah mendahului mereka.

4. *Mandi Balimau Bakasai*

Mandi Balimau Bakasai adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Pulau Birandang pada sehari sebelum masuknya bulan suci Ramadhan. Niatnya adalah untuk mensucikan diri karena mau memasuki bulan yang suci.²⁴

5. Tradisi pernikahan

Tradisi pernikahan pada masyarakat Pulau Birandang, memiliki tahapan yang harus diikuti selama berlangsungnya pernikahan. Kemudian dilarang menikah dengan satu suku yang sama karena ini adalah pantangan

²⁴ Saparuddin, (Pemuka Adat), wawancara, di Desa Pulau Birandang, tanggal 18 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah lama diatur oleh *Ninik Mamak*.²⁵ Dikampar pada umumnya suku mengikuti suku ibu atau biasa disebut Matrilinear sama halnya dengan adat istiadat di Sumatera Barat.

6. *Basiacuong*

Basiacuong adalah cerita sambung menyambung dalam membuka makanan. Hal ini dilakukan sebelum makan bersama pada acara mendo'a syukuran dan acara sakral yang ada di desa Pulau Birandang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa *Ocu* yang telah disepakati oleh kepala daerah, tokoh agama dan kepala adat. Dalam istilahnya (tali bapilin tigo).

²⁵ Wawancara dengan bpk. M. Zen



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIK TENTANG KHITBAH

Pengertian Khitbah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Khitbah*

Kata *khitbah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai sinonim dengan peminangan, yang berasal dari kata “pinang” atau “melamar” (kata kerja)²⁶. Atau bersinonim juga dengan lamaran. Secara etimologis meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain)”. Dikatakan pula bahwa kata *khitbah* yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan” adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.²⁷

Sedangkan makna *Khitbah* secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perijodohan antara seorang pria dan wanita.²⁸ Pengertian tersebut senada dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung memahami *khitbah* sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁹

²⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Kencana, 2006), h. 73.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 82.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 927.

²⁹ Sayyid Sabiq, *"Fiqh al-Sunnah"* Terjemah Mudzakkir AS, Fikih Sunnah, Jilid VI, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), 30 – 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khitbah merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan calon laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, dan supaya terdapat gambaran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginannya yaitu menikah. Serta untuk dapat menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul kekecewaan dan penyesalan dikemudian hari. Serta kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, manfaatnya adalah untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa saja yang menjadi daya tarik untuk menjalani mahlilai rumah tangga dari kedua belah pihak.

Dengan adanya proses melihat tersebut, maka mereka bisa memutuskan apakah akan melanjutkan atau malah membatalkannya. Karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu dianjurkan bagi laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan ataukah dibatalkan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: Lihatlah calon istrimu karena melihat akan mengundang kelanggengan kalian berdua.³⁰

³⁰ M. Quraish Shihab, *Penggantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anak ku*(Jakarta: Lentera Hati, 2007), 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunnah. Keteranganannya adalah sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْءَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya : “Apabila salah seorang kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Dalam pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.³¹

Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (syarih) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran (kinayah).³²

Perbedaan antara bahasa sindiran dan bahasa yang jelas adalah, jika bahasa sindiran menyebutkan sesuatu dengan bahasa ungkapan yang lazim,

³¹ Dahlan Idhamy, Azas-azas Fiqih Munakahat (Surabaya: AL-Ikhlash, 1984), h. 15.

³² Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984) juz III h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya adalah “si fulan bagus perawakannya”, sedangkan bahasa yang jelas adalah bahasa yang langsung memberikan kejelasan untuk menikahi si calon.

Adapun dasar nash al-Quran tentang khitbah atau lamaran:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q. S. Al-Baqarah: 235)³³

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain.

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti merampas hak dan menyakiti hati orang lain, memecahkan hubungan kekeluargaan, mengganggu ketentraman. Maksud dari meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan laki-laki yang pertama dan Walinya dengan terangan-terangan

³³ Al-Qur'anul Karim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan semua ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya maka yang demikian diperbolehkan.³⁴

- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

Wali berkewajiban memilih calon suami untuk anak gadisnya. Ia tidak boleh mengawinkan anaknya itu kecuali dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak baik, sehingga dapat berumah tangga dengan anak tersebut dengan baik tanpa menganiayanya.

Hasan bin Ali pernah ditanya seseorang, ia berkata: “Sesungguhnya saya ini mempunyai seorang anak gadis, dengan siapakah sebaiknya ia saya kawinkan menurut tuan?” “Kawinkanlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah,” jawab Hasan. “Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, ia akan memuliakannya, dan kalau tidak cinta pun takkan menganiaya dia.”³⁵

- c. Perempuan itu tidak pada masa iddah karena thalak raj'i.

Diharamkan bagi orang yang meminang mantan istri orang lain atau wanita yang sedang iddah, baik dalam masa iddah kematian suaminya, karena talaq raj'i maupun talak ba'in. Jika perempuan yang

³⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 78.

³⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*. (Asy-Syifa": Semarang),h.361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang Iddah talaq raj'i haram dipinang, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka.³⁶ Adapun, melakukan lamaran kepada perempuan dalam keadaan talak ba'in (talak tiga), tidak boleh dengan terang-terangan berdasar kesepakatan. Sedang, fuqaha berbeda pendapat tentang lamaran yang dilakukan cara sindirian kepada perempuan karena talak ba'in.³⁷

Sedangkan bagi perempuan yang sedang iddah kematian boleh dipinang secara sindiran, walaupun kalangan ulama fikih masih berbeda pendapat, karena perempuan yang sedang iddah kematian hubungan suami istri terputus sehingga hak suami terhadap istri hilang sama sekali. Meskipun demikian, pinangan yang diajukan kepada perempuan tersebut hendaknya tidak mengganggunya, apalagi sampai mencemarkan namanya dimata tetangga atau kerabatnya.³⁸ Allah SWT berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu

³⁶ Tihami, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), h., 30.

³⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab* (Jakarta: PT Heza Lestari, 2006), h., 117.

³⁸ Tihami, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h, 30

Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah (2): 235)

- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena thalak ba'in, hendaklah meminang dengan cara siryy (tidak terang-terangan).

3. Dasar Hukum Khitbah

Hukum khitbah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. "Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: "Saya ini hanyalah saudaramu" Rasulullah saw menjawab: "Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya" (HR. Bukhari).

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya:

1. Wanita itu disunnahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.³⁹
2. Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan

³⁹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.

3. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda.
4. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah."
5. Disunnahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya.⁴⁰
6. Mengutamakan dasar-dasar agama. Maksud agama disini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadilah utama, dan adab yang mulia.
7. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran
8. Memilih perempuan yang pintar. Maksudnya adalah pintar begaul, yaitu mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik.
9. Memilih perempuan yang cantik.⁴¹

⁴⁰ Ibid 41

⁴¹ Abdul Wahhab Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat syarat *Khitbah*

Khitbah atau tunangan dianggap sah dan benar, apabila memenuhi 2 syarat sebagai berikut:

Pertama, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan larangan syari'at untuk menikah. Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar seorang perempuan yang haram dinikahi baik muhrim permanen maupun muhrim sementara. Diantaranya adalah tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya masih ada.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu meminang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in hendaklah meminang dengan cara sirri (tidak terang-terangan).

Kedua, perempuan itu belum menerima pinangan orang lain. Siapapun tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung acara lamaran dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu bersamaan. Rasulullah SAW bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمُؤْمِنُوا أَحْوَ الْمُؤْمِنِ فَلَاتَحِلَّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا
يَخْطُبَ عَلَى خُطْبِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: “Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu.”

Agama Islam membenarkan adanya peminangan sebelum akad, dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangan calon istrinya dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal.

Dalam Islam memang tidak diatur tentang tata cara peminangan. Menurut Sayyid Sabiq “Peminangan dilakukan dengan cara-cara yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam tata cara peminangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kultur atau budaya masyarakat.

Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan seorang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkannya dan dan mengeruhkan kehidupannya.⁴²

Dalam melaksanakan khitbah, tentu para pihak-pihak yang berkaitan selalu menjadi acuan, terutama subyek khitbah dimana bisa dibagi-

⁴² Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi menjadi dua yakni dilihat dari kriteria keinginan masing-masing mempelai. Maka akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pihak mempelai laki-laki
- b. Pihak mempelai wanita
- c. Orang tua atau
- d. wali

Laki-laki dalam perannya sebagai kepala rumah tangga tentunya banyak yang harus dilihat dari banyak sisi agar kedepannya dalam membina anak dan istri dalam berumah tangga menjadi sosok yang baik dalam keluarganya, itulah hal-hal yang harus dambakan dari mempelai wanita yang menginginkan kriteria suami ideal. Mata merupakan tukang posnya hati dan dutanya perasaan. Karena itu haruslah saling melihat sebelum terjadinya perkawinan.

1. Suami ideal

Suami ideal adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan tuntunan Syar'iat Islam. Mereka itu sangat cakap dalam memenuhi hak Istrinya. Maka suami yang Ideal itu adalah:

- a. Membayar mahar istrinya dengan sempurna.
- b. Melapangkan nafkah istri dengan tidak bakhil dan tidak berlebihan.
- c. Memperlakukan istri dengan baik, mesra dan lemah lembut.
- d. Meminta pendapat istri dalam urusan rumah tangga dan anak-anaknya.
- e. Bersenda gurau dengan istri tanpa berlebihan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- f. Memaafkan kekurangan istri dan berterima kasih atas kelebihannya.
 - g. Berpenampilan bersih, rapi dan wangi dihadapannya.
 - h. Membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga yang kadang tidak tertangani.
 - i. Meringankan pekerjaan istri dengan seorang pembantu bila berkesanggupan.
 - j. Meringakkan pekerjaann istri dengfan perlengkapan dapur dan rumah tangga yang memadai bila berkesanggupan.
 - k. Menempatkan istri ditempat tinggal yang tidak tercampur dengan saudara ipar laki-laki.
 - l. Memerintahkan istri memakai busana muslimah bila keluar rumah,
 - m. menemani istri bila bepergian.
 - n. Tidak menyiarkan rahasia suami
 - o. Menjaga istri dari segala hal yang dapat menimbulkan fitnah kepadanya (istri)
 - p. Tidak membawa istri ketempat tempat maksiat.
 - q. Memberi peringatan dan bimbingan yang baik bila istri lalai dalam kewajibanya.
 - r. Bila harus memukul istri karena alasan yang syar'i, maka ia tidak memukul wajahnya dan anggota tubuhnya yang dapat mengakibatkan krusakan atau berbekas.
 - s. Memuliakan dan menghubungkan silaturahmi kepada orang tua dan keluarga istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

t. Memanggil istri dengan panggilan kesukaanya.

u. Bekerjasama dengan istri dalam taat kepada Allah SWT.

Kriteria Istri pilihan yang disyaratkan dalam Islam ialah:

a. Pemilihan atas dasar agamanya.

Agama yang dimaksudkan disini ialah pemahaman yang benar tentang Islam dan penerapan amaliyahnya terhadap semua keutamaan dan adabnya yang tinggi.

b. Memilih calon istri yang memiliki harta (kaya). Agama Islam tidak melarang seseorang memilih Istri yang punya harta. Dengan demikian diharapkan si istri (nanti) tidak begitu banyak tuntutan kepada suaminya. Pada saat sekarang ini, orang yang mencari jodoh dari wanita yang sudah mempunyai pekerjaan (penghasilan). Namun, harus diingat bahwa seorang suami tidak boleh mengelak dari tanggung jawab menafkahi istri (keluarga), walaupun istri itu orang kaya. Nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami. Berbeda sekiranya istrinya merelakan dan memaafkan, umpamanya diberhentikan dari pekerjaan (P.H.K)

c. Memilih calon istri dari turunan orang baik-baik. Sebab, pada umumnya orang-orang yang baik-baik akan menurunkan anak cucu yang baik-baik pula. Orang yang mempunyai turunan orang baik tidak mesti kalangan atas, status sosialnya tinggi (kasta dan kedudukan), tetapi dapat juga dari kalangan rakyat biasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memilih calon istri yang cantik, karena setiap manusia ada mempunyai kecenderungan ke arah itu. Tentu saja, ukuran cantik atau tidak sangat bergantung kepada orang yang melihat.

Denda Membatalkan Khitbah Perspektif Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁴³

Khitbah (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan babak awal pernikahan menurut syara' maupun adat. Tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal.⁴⁴ Dalam kajian hukum Islam khitbah itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan khitbah tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.

Setelah keluarga perempuan menyetujui khitbah tersebut, terkadang khitbah itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 471-472.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan khitbah baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Orang yang memberi hadiah dalam kasus meminang berhak menarik kembali hadiahnya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan. Ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena dibatalkan khitbah, maka lelaki berhak mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikannya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang dikhitbah tersebut.

Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak memintanya gantinya.”⁴⁵

Para ulama Malikiah menyebutkan jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila" istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 36-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.⁴⁶

Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang mana terjadinya pembatalan pinangan oleh perempuan maka lelaki tersebut berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan oleh perempuan yang membatalkan khitbah tersebut dan hadiah khitbah yang dikembalikan pun sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya.

Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁴⁷

Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak, seperti keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan fungsi khitbah, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas *ta'aruf* (saling mengenal) lebih jauh dengan cara yang disyariatkan maka ketika dalam aktivitas *ta'aruf* salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya atau pun sebaliknya, dia berhak untuk membatalkan khitbah.⁴⁸ Berpalingnya satu pihak dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa khitbah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu, pembatalan khitbah tidak

mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani masa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan.⁴⁹

Pembatalan khitbah merupakan hal yang lumrah, jika menganggap hal ini berlebihan maka hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru. Misalnya, ada anggapan bahwa pembatalan khitbah terjadi karena adanya penilaian bahwa salah satu calonnya memiliki banyak kekurangan, lalu dia menganggap sebagai pihak yang tidak akan pernah dapat menikah dengan orang lain

⁴⁷ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 410.

⁴⁸ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 72.

⁴⁹ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nantinya karena saat ini kekurangan-kekurangan tersebut dinilai telah berkaitan kepada kegagalan khitbahnya dengan seseorang. Padahal, itu hanyalah sikap ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong emosional dan kelemahan iman.

Seperti halnya dalam mengawali khitbah maka ketika akan mengakhiri khitbah dengan pembatalan pun harus dilakukan dengan cara yang makruf dan tidak menyalahi ketentuan syara'. Hal yang perlu diperhatikan ketika membatalkan khitbah adalah adanya alasan-alasan syar'i yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi. Misalnya, salah satu atau pun kedua belah pihak menemukan kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan dia menilai kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti memiliki akhlak yang tidak terpuji (gemar bermaksiat), berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual, berpenyakit menular yang membahayakan, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain pertimbangan berbagai uzur (halangan) tersebut, pembatalan khitbah juga berlaku apabila adanya takdir dari Allah SWT seperti kematian yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang syar'i maka pembatalan khitbah tidak boleh dilakukan karena hal tersebut hanya akan meyakiti satu sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang dikhitbah.⁵⁰

⁵⁰ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* hlm. 72-73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain. Terkadang peminang menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang terpinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.⁵¹ Calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita berhak untuk membatalkan khitbah. Jika khitbah dibatalkan, semua hadiah yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk barang yang bisa habis jika digunakan, seperti makanan atau parfum, maka ia tidak perlu dikembalikan.⁵²

Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.”

Ulama Malikiah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan, karena

⁵¹ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*. hlm. 410.

⁵² Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, *al-Maktabah at- Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara hukum itu disyaratkan.

Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh meminta kembali atau dikembalikan.⁵³

Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.⁵⁴

Jika hadiah khitbah disepakati sebagai bagian dari mahar, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan adat kebiasaan, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka ahli waris pihak laki-laki berhak memintanya kembali jika hadiah itu berbentuk barang yang berharga. Jika barang itu sudah tidak ada, maka ahli waris berhak meminta ganti yang senilai. Jika hadiah khitbah itu tidak dimaksudkan menjadi bagian dari

⁵³ Wahbah Zuhailly, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 36-37

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka hadiah itu dianggap sebagai pemberian yang tidak boleh diminta kembali.⁵⁵

Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak wanita dengan kesepakatan bahwa benda itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka benda itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya.

Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁵⁶

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali jika akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang miliknya.

Fuqaha" sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara

⁵⁵ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, *al-Maktabah at- Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 70-71.

⁵⁶ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 410.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis mengenai ganti rugi pembatalan *khitbah* dalam tinjauan sosiologis di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan *khitbah* didesa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ialah sebagai berikut :
 - a. Maantau tando (*khitbah*)
Yaitu menyerahkan tanda berupa benda seperti 2 helai kain handuk, 2 helai kain panjang/selimut, dua helai kain wsarung/kain pinggang.
 - b. *Maimbau mamak*
Yaitu memberi kabar sekaligus meminta restu kepada paman perempuan untuk menikahkan keponakannya dengan laki-laki yang datang mengkhitbahnya.
2. Penerapan ganti rugi pembatalan *khitbah* di desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
 - a. Pihak laki-laki
Apabila Pihak laki-laki yang membatalkan *khitbah* maka konsekuensinya adalah barang yang diberikan kepada perempuan tidak dapat diambil kembali



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pihak Perempuan

Jika pihak perempuan yang membatalkan khithbah maka konsekuensinya harus mengganti dua kali lipat dari hantaran yang diberikan

c. Tujuan ganti rugi pembatalan khithbah didesa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berdasarkan tinjauan sosiologis.

Yaitu :

1. Tidak menyepelahkan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama dua belah pihak.
2. Menjaga keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat
3. Menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak ditengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti yang selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat banyak kekurangannya. Untuk itu bagi para pembaca diharapkan masukan dan sarannya.

Ada banyak hal yang memicu terjadinya pembatalan khithbah dengan alasan-alasan tertentu. Untuk meminimalisir kejadian tersebut maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Khithbah merupakan masalah yang serius, jadi penulis mengharapkan agar tidak bermain-main dan memikirkannya secara matang sebelum melakukan khithbah. Sehingga tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.

Pembatalan khitbah memang lebih baik daripada perceraian akan tetapi bagi orang yang membatalkan khitbah hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Ini akan berdampak negatif karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Kencana, 2006)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta)
- Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahe Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- Abu Ihsan, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta : Pustaka At- Tazkia, 2006)
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011)
- Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab* (Jakarta: PT Heza Lestari, 2006)
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2003)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amir zuhaili, wahbah *Fiqh Islam 9*, penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003)
- Bapak Azir Selaku sesepuh adat di Desa Pulau Birandang pada tanggal 21 Juni 2020 di Desa Pulau Birandang
- Bertabuh adalah beradat
- Idhamy, Azas-azas Fiqih Munakahat (Surabaya: AL-Ikhlash, 1984)
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Depag RI., 2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*. (Asy-Syifa': Semarang)

M. Quraish Shihab, *Penggantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anak ku*(Jakarta: Lentera Hati, 2007)

M. Shaleh selaku tokoh Masyarakat Desa Pulau Birandang pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Pulau Birandang.

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Khozi. M, *al-Maktabah at- Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Khozi. M, *al-Maktabah at- Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Sosiologi Dan Antropologi Hukum*,(Naskah Aceh: Ulee Kareng, Banda Aceh

Nasrul, Sekretaris Desa Pulau Birandang, *wawancara*, Desa Pulau Birandang, 15 Juli 2020.

Referensi: <https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>

Saparuddin selaku pemuka adat didesa Pemuka Adat Desa Pulau Birandang Pada Tanggal 21 Juli 2020 di desa Pulau Birandang

Saparuddin, (Pemuka Adat), *wawancara*, di Desa Pulau Birandang, tanggal 18 Juli 2020.

Sayid Sabiq, "*Fiqh al-Sunnah*" Terjemah Mudzakkir AS, Fikih Sunnah, Jilid VI, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980)

Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981)

Soersimi, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998)

Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)

Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Taami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Taami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984) juz III

Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*(Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila" istri, Li"an, Masa Iddah) jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **"GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR (Tinjauan Sosiologis)"** yang ditulis oleh :

Nama : Irsyadul Muhtadi
NIM : 11521101649
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag

Penguji I

Darmawatia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Mengetahui,

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: UIN 04/F.I/PP.00.9/4094/2020

Pekanbaru, 08 Juli 2020

: Bisa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: IRSYADUL MUHTADI
NIM	: 11521101649
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Didesa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar
(Tinjauan Sosiologis)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 49580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Terselamatkan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: IRSYADUL MUHTADI

: 11521101649

Program Studi: HUKUM KELUARGA

Judul : *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Tinjauan Sosiologis)*

Pembimbing : Mutasir SHL, M. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Pimpinan Redaksi



M. Adip Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



IRSYADUL MUHTADI, lahir di Pulau Birandang, 30 April 1997. Anak ke 1, dari pasangan Swalis dan Rusmaini Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 030 Pulau Birandang Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampa lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Darul Qur'an Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan ke MAS Darul Qur'an Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lulus pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 juga melanjutkan studi ke Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada bulan July pada tahun yang sama penulis melaksanakan KKN di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan penulis melakukan penelitian di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan judul "Ganti Rujai Pembatalan Khitbah di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Tinjauan Sosiologis), yang di bimbing oleh Bapak Mutasir, S.HI., M.Sy, A.Samdulillah, pada tanggal 19 November 2020 akhirnya penulis telah menyelesaikan studi dengan predikat *Sangat Memuaskan* dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU